



BSK

RENJA

2025

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM



bsk.kemenkum.go.id



REKAP 1A: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM
2. VISI : Terwujudnya Supremasi Hukum Dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
3. MISI :

1. Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025 (RIBU)
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	3.954.743,0
Total		3.954.743,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI		805.197.128,0
01.01	Indeks Kepastian Hukum Nasional	3,1	
02	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi		4.261.403.597,0
02.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	90	
Total			5.066.600.725,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
135.WA	Program Dukungan Manajemen	97.148.968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97.148.968,0	0,0	0,0	0,0
Total		97.148.968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97.148.968,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM
2. UNIT ORGANISASI : 12 - Badan Strategi Kebijakan Hukum
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi
4. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	3.954.743,0
07.02	Reformasi Hukum	3.954.743,0
Total		3.954.743,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
03	Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum		97.148.968,0
03.01	Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum	65	
Total			97.148.968,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
7138	Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum	68.396.623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.396.623,0	0,0	0,0	0,0
7139	Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Hukum	6.050.377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.050.377,0	0,0	0,0	0,0
7140	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	3.375.917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.375.917,0	0,0	0,0	0,0
7141	Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	3.082.927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.082.927,0	0,0	0,0	0,0
7142	Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	4.562.058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.562.058,0	0,0	0,0	0,0
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	11.681.066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.681.066,0	0,0	0,0	0,0
Total		97.148.968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97.148.968,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian Hukum
4. KEGIATAN : 7138 - Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 01 - Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum		68.396.623,0
01.01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	100	
01.02	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum terhadap layanan kesekretariatan	3,1	
Total			68.396.623,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum										68.396.623,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										27.036.208,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBA.003	Layanan Kerja Sama										22.574,0
	051 - Perencanaan Kerja Sama										1.625,0
		Pusat	Pusat								1.625,0
	052 - Pelaksanaan Kerja Sama										19.639,0
		Pusat	Pusat								19.639,0
	053 - Laporan Kerja Sama										1.310,0
		Pusat	Pusat								1.310,0
01.EBA.956	Layanan BMN										240.056,0
	051 - Penatausahaan dan Pengelolaan BMN										212.516,0
		Pusat	Pusat								212.516,0
	052 - Penilaian, Pengalihan dan Monitoring BMN										26.080,0
		Pusat	Pusat								26.080,0
	053 - Penyusunan Laporan BMN										1.460,0
		Pusat	Pusat								1.460,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi										458.990,0
	051 - Peliputan										112.220,0
		Pusat	Pusat								112.220,0
	052 - Publikasi										346.770,0
		Pusat	Pusat								346.770,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBA.959	Layanan Protokoler										138.970,0
	051 - Koordinasi Keprotokoleran										8.250,0
		Pusat	Pusat								8.250,0
	052 - Pelaksanaan Keprotokoleran										130.040,0
		Pusat	Pusat								130.040,0
	053 - Laporan Keprotokoleran										680,0
		Pusat	Pusat								680,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal										36.860,0
	051 - Fasilitas Ketatalaksanaan										19.240,0
		Pusat	Pusat								19.240,0
	052 - Fasilitas Kelembagaan										17.620,0
		Pusat	Pusat								17.620,0
01.EBA.962	Layanan Umum										2.754.552,0
	051 - Administrasi dan Pengelolaan PBJ /UKPBJ										48.784,0
		Pusat	Pusat								48.784,0
	052 - Pengelolaan Rumah Tangga										2.452.098,0
		Pusat	Pusat								2.452.098,0
	053 - Layanan Kesehatan Pegawai										253.670,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								253.670,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran										23.384.206,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										13.496.274,0
		Pusat	Pusat								13.496.274,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										9.887.932,0
		Pusat	Pusat								9.887.932,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										37.787.415,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal										13.197.295,0
	052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										3.799.000,0
		Pusat	Pusat								3.799.000,0
	053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran										9.398.295,0
		Pusat	Pusat								9.398.295,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal										24.590.120,0
	051 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan										24.590.120,0
		Pusat	Pusat								24.590.120,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										1.132.735,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM										1.132.735,0
	051 - Administrasi SDM										69.436,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								69.436,0
	052 - Pembinaan dan Pengelolaan SDM										2.450,0
		Pusat	Pusat								2.450,0
	053 - Pengembangan SDM										1.060.849,0
		Pusat	Pusat								1.060.849,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										2.440.265,0
01.EBD.001	Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan Supervisi Anggaran										116.556,0
	051 - Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran										25.136,0
		Pusat	Pusat								25.136,0
	052 - Penyusunan Informasi Kinerja										40.492,0
		Pusat	Pusat								40.492,0
	053 - Supervisi Penyusunan Anggaran										50.928,0
		Pusat	Pusat								50.928,0
01.EBD.002	Laporan Kinerja Unit Eselon I										61.948,0
	051 - Koordinasi Penyusunan Lakin Unit										5.300,0
		Pusat	Pusat								5.300,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Penyusunan Lakin Unit										56.648,0
		Pusat	Pusat								56.648,0
01.EBD.003	Fasilitasi Evaluasi Kinerja										1.383.955,0
	051 - Penyusunan Laporan SPIP										20.710,0
		Pusat	Pusat								20.710,0
	052 - Penyusunan Laporan SAKIP										42.286,0
		Pusat	Pusat								42.286,0
	053 - Penyusunan Laporan Manajemen Risiko										112.950,0
		Pusat	Pusat								112.950,0
	054 - Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja										1.208.009,0
		Pusat	Pusat								1.208.009,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran										116.068,0
	051 - Layanan Perencanaan										76.874,0
		Pusat	Pusat								76.874,0
	052 - Layanan Penganggaran										39.194,0
		Pusat	Pusat								39.194,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi										41.714,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tusi										38.214,0
		Pusat	Pusat								38.214,0
	052 - Pelaporan										3.500,0
		Pusat	Pusat								3.500,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan										222.760,0
	051 - Pelaksanaan Anggaran										20.640,0
		Pusat	Pusat								20.640,0
	052 - Akuntansi dan Pelaporan										181.960,0
		Pusat	Pusat								181.960,0
	053 - Perbendaharaan										20.160,0
		Pusat	Pusat								20.160,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja										391.524,0
	051 - Fasilitasi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										327.560,0
		Pusat	Pusat								327.560,0
	052 - Supervisi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										44.374,0
		Pusat	Pusat								44.374,0
	053 - Pembangunan Budaya Anti Korupsi										19.590,0
		Pusat	Pusat								19.590,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan										105.740,0
	051 - Pengelolaan Kearsipan										6.240,0
		Pusat	Pusat								6.240,0
	052 - Pengawasan dan Pemusnahan Kearsipan										99.500,0
		Pusat	Pusat								99.500,0
Total											68.396.623,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum				68.396.623,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		27.036.208,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.003	Layanan Kerja Sama	1	Layanan		22.574,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.003.051	Perencanaan Kerja Sama	0,0	Layanan	0,0	1.625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.003.052	Pelaksanaan Kerja Sama	1,0	Layanan	19.639,0	19.639,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.003.053	Laporan Kerja Sama	1,0	Layanan	1.310,0	1.310,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan		240.056,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	1,0	Layanan	212.516,0	212.516,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBA.956.052	Penilaian, Pengalihan dan Monitoring BMN	1,0	Layanan	26.080,0	26.080,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.053	Penyusunan Laporan BMN	0,0	Layanan	0,0	1.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		458.990,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.051	Peliputan	1,0	Layanan	112.220,0	112.220,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.052	Publikasi	1,0	Layanan	346.770,0	346.770,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.959	Layanan Protokoler	1	Layanan		138.970,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.959.051	Koordinasi Keprotokoleran	1,0	Layanan	8.250,0	8.250,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.959.052	Pelaksanaan Keprotokoleran	1,0	Layanan	130.040,0	130.040,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.959.053	Laporan Keprotokoleran	0,0	Layanan	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		36.860,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.051	Fasilitasi Ketatalaksanaan	1,0	Layanan	19.240,0	19.240,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.052	Fasilitasi Kelembagaan	1,0	Layanan	17.620,0	17.620,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan		2.754.552,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.051	Administrasi dan Pengelolaan PBJ /UKPBJ	0,0	Layanan	0,0	48.784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.052	Pengelolaan Rumah Tangga	1,0	Layanan	2.452.098,0	2.452.098,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.053	Layanan Kesehatan Pegawai	1,0	Layanan	253.670,0	253.670,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		23.384.206,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	1,0	Layanan	13.496.274,0	13.496.274,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Layanan	9.887.932,0	9.887.932,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		37.787.415,0				0,0	0,0	0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit		13.197.295,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBB.951.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0,0	Unit	0,0	3.799.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0,0	Unit	0,0	9.398.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit		24.590.120,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBB.971.051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1,0	Paket	24.590.120,0	24.590.120,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		1.132.735,0				0,0	0,0	0,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1	Layanan		1.132.735,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.051	Administrasi SDM	1,0	Layanan	69.436,0	69.436,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.052	Pembinaan dan Pengelolaan SDM	1,0	Layanan	2.450,0	2.450,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.053	Pengembangan SDM	1,0	Layanan	1.060.849,0	1.060.849,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		2.440.265,0				0,0	0,0	0,0
01.EBD.001	Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan Supervisi Anggaran	1	Dokumen		116.556,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.001.051	Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran	1,0	Dokumen	25.136,0	25.136,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.001.052	Penyusunan Informasi Kinerja	0,0	Dokumen	0,0	40.492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.001.053	Supervisi Penyusunan Anggaran	0,0	Dokumen	0,0	50.928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.002	Laporan Kinerja Unit Eselon I	1	Dokumen		61.948,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.002.051	Koordinasi Penyusunan Lakin Unit	0,0	Dokumen	0,0	5.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.002.052	Penyusunan Lakin Unit	1,0	Dokumen	56.648,0	56.648,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.003	Fasilitasi Evaluasi Kinerja	1	Laporan		1.383.955,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBD.003.051	Penyusunan Laporan SPIP	1,0	Laporan	20.710,0	20.710,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.003.052	Penyusunan Laporan SAKIP	1,0	Laporan	42.286,0	42.286,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.003.053	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko	1,0	Laporan	112.950,0	112.950,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.003.054	Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja	1,0	Laporan	1.208.009,0	1.208.009,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan		116.068,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.051	Layanan Perencanaan	1,0	Layanan	76.874,0	76.874,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.052	Layanan Penganggaran	1,0	Layanan	39.194,0	39.194,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		41.714,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.051	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tusi	1,0	Layanan	38.214,0	38.214,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.052	Pelaporan	0,0	Laporan	0,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan		222.760,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.051	Pelaksanaan Anggaran	1,0	Layanan	20.640,0	20.640,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.052	Akuntansi dan Pelaporan	1,0	Laporan	181.960,0	181.960,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.053	Perbendaharaan	1,0	Laporan	20.160,0	20.160,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan		391.524,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.051	Fasilitasi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1,0	Layanan	327.560,0	327.560,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.052	Supervisi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1,0	Layanan	44.374,0	44.374,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.053	Pembangunan Budaya Anti Korupsi	0,0	Layanan	0,0	19.590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan		105.740,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974.051	Pengelolaan Kearsipan	0,0	Layanan	0,0	6.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBD.974.052	Pengawasan dan Pemusnahan Kearsipan	0,0	Layanan	0,0	99.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					68.396.623,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum		68.396.623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.396.623,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		27.036.208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.036.208,0
01.EBA.003	Layanan Kerja Sama		22.574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.574,0
01.EBA.003.051	Perencanaan Kerja Sama	Utama	1.625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.625,0
01.EBA.003.052	Pelaksanaan Kerja Sama	Utama	19.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.639,0
01.EBA.003.053	Laporan Kerja Sama	Pendukung	1.310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.310,0
01.EBA.956	Layanan BMN		240.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240.056,0
01.EBA.956.051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	Utama	212.516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212.516,0
01.EBA.956.052	Penilaian, Pengalihan dan Monitoring BMN	Utama	26.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.080,0
01.EBA.956.053	Penyusunan Laporan BMN	Utama	1.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.460,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		458.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458.990,0
01.EBA.958.051	Peliputan	Utama	112.220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112.220,0
01.EBA.958.052	Publikasi	Utama	346.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346.770,0
01.EBA.959	Layanan Protokoler		138.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138.970,0
01.EBA.959.051	Koordinasi Keprotokoleran	Utama	8.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.250,0
01.EBA.959.052	Pelaksanaan Keprotokoleran	Utama	130.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.040,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBA.959.053	Laporan Keprotokoleran	Utama	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		36.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.860,0
01.EBA.960.051	Fasilitasi Ketatalaksanaan	Utama	19.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.240,0
01.EBA.960.052	Fasilitasi Kelembagaan	Utama	17.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.620,0
01.EBA.962	Layanan Umum		2.754.552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.754.552,0
01.EBA.962.051	Administrasi dan Pengelolaan PBJ /UKPBJ	Utama	48.784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.784,0
01.EBA.962.052	Pengelolaan Rumah Tangga	Utama	2.452.098,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.452.098,0
01.EBA.962.053	Layanan Kesehatan Pegawai	Utama	253.670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253.670,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		23.384.206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.384.206,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	13.496.274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.496.274,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	9.887.932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.887.932,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		37.787.415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.787.415,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		13.197.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.197.295,0
01.EBB.951.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Utama	3.799.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.799.000,0
01.EBB.951.053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Utama	9.398.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.398.295,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		24.590.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.590.120,0
01.EBB.971.051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Utama	24.590.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.590.120,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		1.132.735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.132.735,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		1.132.735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.132.735,0
01.EBC.954.051	Administrasi SDM	Utama	69.436,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.436,0
01.EBC.954.052	Pembinaan dan Pengelolaan SDM	Utama	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.450,0
01.EBC.954.053	Pengembangan SDM	Utama	1.060.849,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.060.849,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.440.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.440.265,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.001	Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan Supervisi Anggaran		116.556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116.556,0
01.EBD.001.051	Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran	Utama	25.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.136,0
01.EBD.001.052	Penyusunan Informasi Kinerja	Utama	40.492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.492,0
01.EBD.001.053	Supervisi Penyusunan Anggaran	Utama	50.928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.928,0
01.EBD.002	Laporan Kinerja Unit Eselon I		61.948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61.948,0
01.EBD.002.051	Koordinasi Penyusunan Lakin Unit	Pendukung	5.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.300,0
01.EBD.002.052	Penyusunan Lakin Unit	Utama	56.648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56.648,0
01.EBD.003	Fasilitasi Evaluasi Kinerja		1.383.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383.955,0
01.EBD.003.051	Penyusunan Laporan SPIP	Utama	20.710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.710,0
01.EBD.003.052	Penyusunan Laporan SAKIP	Utama	42.286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.286,0
01.EBD.003.053	Penyusunan Laporan Manajemen Risiko	Utama	112.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112.950,0
01.EBD.003.054	Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja	Utama	1.208.009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.208.009,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		116.068,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116.068,0
01.EBD.952.051	Layanan Perencanaan	Utama	76.874,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76.874,0
01.EBD.952.052	Layanan Penganggaran	Utama	39.194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.194,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		41.714,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.714,0
01.EBD.953.051	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tusi	Utama	38.214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.214,0
01.EBD.953.052	Pelaporan	Pendukung	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		222.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222.760,0
01.EBD.955.051	Pelaksanaan Anggaran	Utama	20.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.640,0
01.EBD.955.052	Akuntansi dan Pelaporan	Utama	181.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181.960,0
01.EBD.955.053	Perbendaharaan	Utama	20.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.160,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		391.524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391.524,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.961.051	Fasilitasi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Utama	327.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327.560,0
01.EBD.961.052	Supervisi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Utama	44.374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.374,0
01.EBD.961.053	Pembangunan Budaya Anti Korupsi	Utama	19.590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.590,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		105.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105.740,0
01.EBD.974.051	Pengelolaan Kearsipan	Utama	6.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.240,0
01.EBD.974.052	Pengawasan dan Pemusnahan Kearsipan	Utama	99.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99.500,0
Total			68.396.623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.396.623,0

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum
4. KEGIATAN : 7139 - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 02 - Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan hukum		6.050.377,0
01.01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan hukum yang ditindaklanjuti	95	
Total			6.050.377,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan hukum										6.050.377,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM										2.465.778,0
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum										1.232.889,0
	051 - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum										726.345,0
		Pusat	Pusat								726.345,0
	052 - Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum										63.540,0
		Pusat	Pusat								63.540,0
	053 - Komunikasi Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum										407.312,0
		Pusat	Pusat								407.312,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	054 - Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum										35.692,0
		Pusat	Pusat								35.692,0
01.ABD.002	Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum										1.232.889,0
	051 - Analisis Strategi Kebijakan Penegakan Hukum										726.345,0
		Pusat	Pusat								726.345,0
	052 - Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum										63.540,0
		Pusat	Pusat								63.540,0
	053 - Komunikasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum										407.312,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								407.312,0
	054 - Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Penegakan Hukum										35.692,0
		Pusat	Pusat								35.692,0
01.QMA	Data dan Informasi Publik										3.584.599,0
01.QMA.001	Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH)				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	Penguatan Pelindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral			3.584.599,0
	051 - Persiapan										226.194,0
		Pusat	Pusat								226.194,0
	052 - Pelaksanaan										3.357.293,0
		Pusat	Pusat								3.357.293,0
	053 - Pelaporan										1.112,0
		Pusat	Pusat								1.112,0
Total											6.050.377,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan hukum				6.050.377,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		2.465.778,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum	4	Rekomendasi Kebijakan		1.232.889,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.051	Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum	4,0	Rekomendasi Kebijakan	181.586,3	726.345,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum	4,0	Laporan	15.885,0	63.540,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum	4,0	Laporan	101.828,0	407.312,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum	4,0	Laporan	8.923,0	35.692,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002	Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	4	Rekomendasi Kebijakan		1.232.889,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.051	Analisis Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	4,0	Rekomendasi Kebijakan	181.586,3	726.345,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	4,0	Laporan	15.885,0	63.540,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	4,0	Laporan	101.828,0	407.312,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	4,0	Laporan	8.923,0	35.692,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.QMA	Data dan Informasi Publik		dokumen/ Peta/ Data		3.584.599,0				0,0	0,0	0,0
01.QMA.001	Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH)	1	dokumen		3.584.599,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.QMA.001.051	Persiapan	1,0	Dokumen	226.194,0	226.194,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.QMA.001.052	Pelaksanaan	1,0	Dokumen	3.357.293,0	3.357.293,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.QMA.001.053	Pelaporan	1,0	Dokumen	1.112,0	1.112,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					6.050.377,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan hukum		6.050.377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.050.377,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		2.465.778,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.465.778,0
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum		1.232.889,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232.889,0
01.ABD.001.051	Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum	Utama	726.345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726.345,0
01.ABD.001.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum	Utama	63.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63.540,0
01.ABD.001.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum	Utama	407.312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407.312,0
01.ABD.001.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Hukum	Utama	35.692,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.692,0
01.ABD.002	Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum		1.232.889,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232.889,0
01.ABD.002.051	Analisis Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	Utama	726.345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726.345,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ABD.002.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	Utama	63.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63.540,0
01.ABD.002.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	Utama	407.312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407.312,0
01.ABD.002.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	Utama	35.692,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.692,0
01.QMA	Data dan Informasi Publik		3.584.599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.584.599,0
01.QMA.001	Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH)		3.584.599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.584.599,0
01.QMA.001.051	Persiapan	Utama	226.194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226.194,0
01.QMA.001.052	Pelaksanaan	Utama	3.357.293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.357.293,0
01.QMA.001.053	Pelaporan	Utama	1.112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.112,0
Total			6.050.377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.050.377,0

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum
4. KEGIATAN : 7140 - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 03 - Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum		3.375.917,0
01.01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum yang ditindaklanjuti	95	
Total			3.375.917,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum</i>										3.375.917,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM										1.428.762,0
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum										730.048,0
	051 - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum										445.235,0
		Pusat	Pusat								445.235,0
	052 - Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum										92.720,0
		Pusat	Pusat								92.720,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Komunikasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum										192.093,0
		Pusat	Pusat								192.093,0
01.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Bantuan Hukum										698.714,0
	051 - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hak Asasi Manusia										437.080,0
		Pusat	Pusat								437.080,0
	052 - Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hak Asasi Manusia										69.540,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								69.540,0
	053 - Komunikasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hak Asasi Manusia										192.094,0
		Pusat	Pusat								192.094,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik										1.577.011,0
01.BMA.001	Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kementerian Hukum										1.577.011,0
	051 - Verifikasi Hasil Survei										512.315,0
		Pusat	Pusat								512.315,0
	052 - Monitoring										1.064.696,0
		Pusat	Pusat								1.064.696,0
01.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM										370.144,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.PBD.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional			370.144,0
	051 - Analisis Strategi Kebijakan										370.144,0
		Pusat	Pusat								370.144,0
Total											3.375.917,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum				3.375.917,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		1.428.762,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	4	Rekomendasi Kebijakan		730.048,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.ABD.001.051	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	4,0	Rekomendasi Kebijakan	111.308,8	445.235,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	4,0	Laporan	23.180,0	92.720,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	4,0	Laporan	48.023,3	192.093,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Bantuan Hukum	4	Rekomendasi Kebijakan		698.714,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.051	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hak Asasi Manusia	4,0	Rekomendasi Kebijakan	109.270,0	437.080,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hak Asasi Manusia	4,0	Laporan	17.385,0	69.540,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hak Asasi Manusia	4,0	Laporan	48.023,5	192.094,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		dokumen/ Peta/ Data		1.577.011,0				0,0	0,0	0,0
01.BMA.001	Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kementerian Hukum	1	dokumen		1.577.011,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.BMA.001.051	Verifikasi Hasil Survei	1,0	Dokumen	512.315,0	512.315,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA.001.052	Monitoring	1,0	Dokumen	1.064.696,0	1.064.696,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan/ Peta/ Data		370.144,0				0,0	0,0	0,0
01.PBD.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP	1	Rekomendasi Kebijakan		370.144,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.PBD.001.051	Analisis Strategi Kebijakan	1,0	Dokumen	370.144,0	370.144,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
Total					3.375.917,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										TOTAL
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum		3.375.917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.375.917,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1.428.762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.428.762,0
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum		730.048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730.048,0
01.ABD.001.051	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	Utama	445.235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445.235,0
01.ABD.001.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	Utama	92.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.720,0
01.ABD.001.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	Utama	192.093,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192.093,0
01.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Bantuan Hukum		698.714,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	698.714,0
01.ABD.002.051	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hak Asasi Manusia	Utama	437.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437.080,0
01.ABD.002.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hak Asasi Manusia	Utama	69.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.540,0
01.ABD.002.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hak Asasi Manusia	Utama	192.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192.094,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		1.577.011,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.577.011,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BMA.001	Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kementerian Hukum		1.577.011,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.577.011,0
01.BMA.001.051	Verifikasi Hasil Survei	Utama	512.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512.315,0
01.BMA.001.052	Monitoring	Utama	1.064.696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.064.696,0
01.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		370.144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370.144,0
01.PBD.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP		370.144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370.144,0
01.PBD.001.051	Analisis Strategi Kebijakan	Utama	370.144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370.144,0
Total			3.375.917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.375.917,0

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum
4. KEGIATAN : 7141 - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 04 - Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum		3.082.927,0
01.01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum yang ditindaklanjuti	95	
Total			3.082.927,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum										3.082.927,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM										1.228.608,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi										409.536,0
	051 - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi										186.456,0
		Pusat	Pusat								186.456,0
	052 - Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi										22.840,0
		Pusat	Pusat								22.840,0
	053 - Komunikasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi										26.232,0
		Pusat	Pusat								26.232,0
	054 - Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi										174.008,0
		Pusat	Pusat								174.008,0
01.ABD.002	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal										409.536,0
	051 - Analisis Strategi Kebijakan Pengawasan Internal										186.456,0
		Pusat	Pusat								186.456,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal										22.840,0
		Pusat	Pusat								22.840,0
	053 - Komunikasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal										26.232,0
		Pusat	Pusat								26.232,0
	054 - Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pengawasan Internal										174.008,0
		Pusat	Pusat								174.008,0
01.ABD.003	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur										409.536,0
	051 - Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur										186.456,0
		Pusat	Pusat								186.456,0
	052 - Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur										22.840,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								22.840,0
	053 - Komunikasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur										26.232,0
		Pusat	Pusat								26.232,0
	054 - Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur										174.008,0
		Pusat	Pusat								174.008,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik										1.854.319,0
01.BMA.001	Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum										1.854.319,0
	051 - Persiapan										8.600,0
		Pusat	Pusat								8.600,0
	052 - Pelaksanaan										1.723.333,0
		Pusat	Pusat								1.723.333,0
	053 - Pelaporan										122.386,0
		Pusat	Pusat								122.386,0
Total											3.082.927,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum				3.082.927,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		1.228.608,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi	4	Rekomendasi Kebijakan		409.536,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.051	Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi	4,0	Rekomendasi Kebijakan	46.614,0	186.456,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi	4,0	Laporan	5.710,0	22.840,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi	4,0	Laporan	6.558,0	26.232,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi	4,0	Laporan	43.502,0	174.008,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal	4	Rekomendasi Kebijakan		409.536,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.051	Analisis Strategi Kebijakan Pengawasan Internal	4,0	Rekomendasi Kebijakan	46.614,0	186.456,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal	4,0	Laporan	5.710,0	22.840,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal	4,0	Laporan	6.558,0	26.232,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.002.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pengawasan Internal	4,0	Laporan	43.502,0	174.008,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.003	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	4	Rekomendasi Kebijakan		409.536,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.ABD.003.051	Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	4,0	Rekomendasi Kebijakan	46.614,0	186.456,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.ABD.003.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	4,0	Laporan	5.710,0	22.840,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.003.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	4,0	Laporan	6.558,0	26.232,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.003.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	4,0	Laporan	43.502,0	174.008,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		dokumen/ Peta/ Data		1.854.319,0				0,0	0,0	0,0
01.BMA.001	Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum	1	dokumen		1.854.319,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.BMA.001.051	Persiapan	1,0	Dokumen	8.600,0	8.600,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA.001.052	Pelaksanaan	1,0	Dokumen	1.723.333,0	1.723.333,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA.001.053	Pelaporan	1,0	Dokumen	122.386,0	122.386,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					3.082.927,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum		3.082.927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.082.927,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1.228.608,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.228.608,0
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi		409.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409.536,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ABD.001.051	Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi	Utama	186.456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186.456,0
01.ABD.001.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi	Utama	22.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.840,0
01.ABD.001.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi	Utama	26.232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.232,0
01.ABD.001.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi	Utama	174.008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174.008,0
01.ABD.002	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal		409.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409.536,0
01.ABD.002.051	Analisis Strategi Kebijakan Pengawasan Internal	Utama	186.456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186.456,0
01.ABD.002.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal	Utama	22.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.840,0
01.ABD.002.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal	Utama	26.232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.232,0
01.ABD.002.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pengawasan Internal	Utama	174.008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174.008,0
01.ABD.003	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur		409.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409.536,0
01.ABD.003.051	Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Utama	186.456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186.456,0
01.ABD.003.052	Dokumentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Utama	22.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.840,0
01.ABD.003.053	Komunikasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Utama	26.232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.232,0
01.ABD.003.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Utama	174.008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174.008,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BMA	Data dan Informasi Publik		1.854.319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.854.319,0
01.BMA.001	Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum		1.854.319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.854.319,0
01.BMA.001.051	Persiapan	Utama	8.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.600,0
01.BMA.001.052	Pelaksanaan	Utama	1.723.333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.723.333,0
01.BMA.001.053	Pelaporan	Utama	122.386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122.386,0
Total			3.082.927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.082.927,0

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum
4. KEGIATAN : 7142 - Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 05 - Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum		1.264.048,0
01.01	Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum yang ditindaklanjuti	95	
02	Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi		1.830.549,0
02.02	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan	82	
03	Meningkatnya layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai enabler layanan strategi kebijakan hukum		1.467.461,0
03.03	Meningkatnya layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai enabler layanan strategi kebijakan hukum	98	
Total			4.562.058,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum</i>										1.264.048,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM										510.048,0
01.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Hukum										510.048,0
	051 - Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum										302.218,0
		Pusat	Pusat								302.218,0
	052 - Dokumentasi Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum										38.310,0
		Pusat	Pusat								38.310,0
	053 - Komunikasi Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum										155.300,0
		Pusat	Pusat								155.300,0
	054 - Pengukuran Pemanfaatan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum										14.220,0
		Pusat	Pusat								14.220,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik										754.000,0
01.BMA.002	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia										754.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Persiapan										16.150,0
		Pusat	Pusat								16.150,0
	052 - Pelaksanaan										731.190,0
		Pusat	Pusat								731.190,0
	053 - Pelaporan										6.660,0
		Pusat	Pusat								6.660,0
02	<i>Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi</i>										1.830.549,0
02.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM										501.192,0
02.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum										501.192,0
	051 - Evaluasi Strategi Kebijakan										315.140,0
		Pusat	Pusat								315.140,0
	052 - Dokumentasi Evaluasi Strategi Kebijakan										37.612,0
		Pusat	Pusat								37.612,0
	053 - Komunikasi Evaluasi Strategi Kebijakan										134.450,0
		Pusat	Pusat								134.450,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	054 - Pengukuran Pemanfaatan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan										13.990,0
		Pusat	Pusat								13.990,0
02.BMA	Data dan Informasi Publik										1.329.357,0
02.BMA.001	Data dan Informasi Publik										1.329.357,0
	051 - Pengelolaan Data, Dokumentasi dan Informasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia										670.403,0
		Pusat	Pusat								670.403,0
	052 - Publikasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia										658.954,0
		Pusat	Pusat								658.954,0
03	<i>Meningkatnya layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai enabler layanan strategi kebijakan hukum</i>										1.467.461,0
03.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan										1.467.461,0
03.FAB.001	Data dan Informasi Digital Badan Strategi Kebijakan Hukum										25.081,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengelolaan dan Pelayanan Teknologi Informasi										6.801,0
		Pusat	Pusat								6.801,0
	052 - Pengelolaan dan Pelayanan Sistem Informasi										18.280,0
		Pusat	Pusat								18.280,0
03.FAB.002	Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum										1.442.380,0
	051 - Pengelolaan dan Pelayanan Teknologi Informasi Analisis Strategi Kebijakan Hukum										770.000,0
		Pusat	Pusat								770.000,0
	052 - Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi										362.000,0
		Pusat	Pusat								362.000,0
	054 - Penyusunan Dokumen Tata Kelola TIK										310.380,0
		Pusat	Pusat								310.380,0
Total											4.562.058,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum				1.264.048,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		510.048,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Hukum	4	Rekomendasi Kebijakan		510.048,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.051	Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum	4,0	Rekomendasi Kebijakan	75.554,5	302.218,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.052	Dokumentasi Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum	0,0	Laporan	0,0	38.310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.053	Komunikasi Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum	0,0	Laporan	0,0	155.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum	0,0	Laporan	0,0	14.220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		dokumen/ Peta/ Data		754.000,0				0,0	0,0	0,0
01.BMA.002	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	dokumen		754.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.BMA.002.051	Persiapan	1,0	Dokumen	16.150,0	16.150,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA.002.052	Pelaksanaan	1,0	Dokumen	731.190,0	731.190,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA.002.053	Pelaporan	1,0	Dokumen	6.660,0	6.660,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02	Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi				1.830.549,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		501.192,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	4	Rekomendasi Kebijakan		501.192,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.ABD.002.051	Evaluasi Strategi Kebijakan	0,0	Rekomendasi Kebijakan	0,0	315.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABD.002.052	Dokumentasi Evaluasi Strategi Kebijakan	0,0	Laporan	0,0	37.612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABD.002.053	Komunikasi Evaluasi Strategi Kebijakan	0,0	Laporan	0,0	134.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABD.002.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan	0,0	Laporan	0,0	13.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BMA	Data dan Informasi Publik		dokumen/ Peta/ Data		1.329.357,0				0,0	0,0	0,0
02.BMA.001	Data dan Informasi Publik	1	dokumen		1.329.357,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.BMA.001.051	Pengelolaan Data, Dokumentasi dan Informasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1,0	Dokumen	670.403,0	670.403,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.BMA.001.052	Publikasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1,0	Dokumen	658.954,0	658.954,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03	Meningkatnya layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai enabler layanan strategi kebijakan hukum				1.467.461,0				0,0	0,0	0,0
03.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi		1.467.461,0				0,0	0,0	0,0
03.FAB.001	Data dan Informasi Digital Badan Strategi Kebijakan Hukum	1	Sistem Informasi		25.081,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
03.FAB.001.051	Pengelolaan dan Pelayanan Teknologi Informasi	1,0	Layanan	6.801,0	6.801,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.FAB.001.052	Pengelolaan dan Pelayanan Sistem Informasi	1,0	Layanan	18.280,0	18.280,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.FAB.002	Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum	1	Sistem Informasi		1.442.380,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.FAB.002.051	Pengelolaan dan Pelayanan Teknologi Informasi Analisis Strategi Kebijakan Hukum	1,0	Sistem Informasi	770.000,0	770.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.FAB.002.052	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	1,0	Sistem Informasi	362.000,0	362.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.FAB.002.054	Penyusunan Dokumen Tata Kelola TIK	0,0	Dokumen	0,0	310.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					4.562.058,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum		1.264.048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.264.048,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		510.048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510.048,0
01.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Hukum		510.048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510.048,0
01.ABD.001.051	Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum	Utama	302.218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302.218,0
01.ABD.001.052	Dokumentasi Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum	Utama	38.310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.310,0
01.ABD.001.053	Komunikasi Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum	Utama	155.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155.300,0
01.ABD.001.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum	Utama	14.220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.220,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		754.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754.000,0
01.BMA.002	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		754.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754.000,0
01.BMA.002.051	Persiapan	Utama	16.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.150,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BMA.002.052	Pelaksanaan	Utama	731.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	731.190,0
01.BMA.002.053	Pelaporan	Utama	6.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.660,0
02	Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi		1.830.549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.830.549,0
02.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		501.192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	501.192,0
02.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum		501.192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	501.192,0
02.ABD.002.051	Evaluasi Strategi Kebijakan	Utama	315.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315.140,0
02.ABD.002.052	Dokumentasi Evaluasi Strategi Kebijakan	Utama	37.612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.612,0
02.ABD.002.053	Komunikasi Evaluasi Strategi Kebijakan	Utama	134.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134.450,0
02.ABD.002.054	Pengukuran Pemanfaatan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan	Utama	13.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.990,0
02.BMA	Data dan Informasi Publik		1.329.357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.329.357,0
02.BMA.001	Data dan Informasi Publik		1.329.357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.329.357,0
02.BMA.001.051	Pengelolaan Data, Dokumentasi dan Informasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Utama	670.403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670.403,0
02.BMA.001.052	Publikasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Utama	658.954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	658.954,0
03	Meningkatnya layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai enabler layanan strategi kebijakan hukum		1.467.461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.467.461,0
03.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1.467.461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.467.461,0
03.FAB.001	Data dan Informasi Digital Badan Strategi Kebijakan Hukum		25.081,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.081,0
03.FAB.001.051	Pengelolaan dan Pelayanan Teknologi Informasi	Utama	6.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.801,0
03.FAB.001.052	Pengelolaan dan Pelayanan Sistem Informasi	Utama	18.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.280,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.FAB.002	Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum		1.442.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.442.380,0
03.FAB.002.051	Pengelolaan dan Pelayanan Teknologi Informasi Analisis Strategi Kebijakan Hukum	Utama	770.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770.000,0
03.FAB.002.052	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Utama	362.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362.000,0
03.FAB.002.054	Penyusunan Dokumen Tata Kelola TIK	Utama	310.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310.380,0
Total			4.562.058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.562.058,0

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum
4. KEGIATAN : 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 07 - Kantor Wilayah

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah		11.681.066,0
01.01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80	
Total			11.681.066,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah										11.681.066,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM										10.999.346,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah										10.999.346,0
	051 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum										10.999.346,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								344.533,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								419.390,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								312.056,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								355.764,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								301.753,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								332.072,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								283.664,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								310.984,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								365.088,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								371.154,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								215.744,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								364.798,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								430.975,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								326.170,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								488.797,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								285.620,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								283.278,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								311.680,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								361.717,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								224.173,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								318.424,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								257.442,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								262.673,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								297.020,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								410.046,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								382.869,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								312.897,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								367.799,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								345.302,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								303.671,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								375.601,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								257.517,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								418.675,0
01.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi										681.720,0
01.AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum										681.720,0
	051 - Persiapan Sosialisasi										97.994,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								3.206,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								2.780,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								1.680,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								2.117,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								353,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								2.180,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								3.030,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								2.050,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								3.275,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								1.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								1.700,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								3.460,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								1.916,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								1.322,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								1.500,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								1.400,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								3.330,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								28.830,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								1.500,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								2.980,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								5.400,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								1.610,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								7.627,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								207,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								1.500,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								400,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								2.410,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								1.130,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								417,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								554,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								2.810,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								3.820,0
	052 - Pelaksanaan Sosialisasi										559.217,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								15.600,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								31.246,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								6.840,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								20.683,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								14.800,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								15.370,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								16.760,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								9.270,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								55.990,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								14.593,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								38.600,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								14.265,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								9.800,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								9.337,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								20.000,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								16.820,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								6.600,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								7.645,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								30.470,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								6.120,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								10.550,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								26.075,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								6.284,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								21.400,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								20.165,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								7.430,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								6.596,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								9.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								13.450,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								19.883,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								9.305,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								29.270,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								19.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Laporan Sosialisasi										24.509,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								520,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								1.780,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								1.117,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								275,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								308,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								210,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								500,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								735,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								250,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								500,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								300,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								360,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								1.170,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								1.626,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								1.041,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								1.158,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								700,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								260,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								625,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								1.520,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								1.610,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								2.500,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								28,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								119,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								400,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								590,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								200,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								100,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								300,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								1.450,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								2.257,0
Total											11.681.066,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah				11.681.066,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		10.999.346,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	132	Rekomendasi Kebijakan		10.999.346,0	132	132	132	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.051	Analisis Strategi Kebijakan Hukum	132,0	Rekomendasi Kebijakan	83.328,4	10.999.346,0	132,0	132,0	132,0	0,0	0,0	0,0
01.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		orang		681.720,0				0,0	0,0	0,0
01.AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	33	orang		681.720,0	33	33	33	0,0	0,0	0,0
01.AEF.001.051	Persiapan Sosialisasi	32,0	Laporan	3.062,3	97.994,0	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
01.AEF.001.052	Pelaksanaan Sosialisasi	33,0	Laporan	16.946,0	559.217,0	33,0	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0
01.AEF.001.053	Laporan Sosialisasi	31,0	Laporan	790,6	24.509,0	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0
Total					11.681.066,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah		11.681.066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.681.066,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		10.999.346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.999.346,0
01.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		10.999.346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.999.346,0
01.ABD.001.051	Analisis Strategi Kebijakan Hukum	Utama	10.999.346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.999.346,0
01.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		681.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681.720,0
01.AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum		681.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681.720,0
01.AEF.001.051	Persiapan Sosialisasi	Pendukung	97.994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97.994,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AEF.001.052	Pelaksanaan Sosialisasi	Utama	559.217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	559.217,0
01.AEF.001.053	Laporan Sosialisasi	Pendukung	24.509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.509,0
Total			11.681.066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.681.066,0

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001